

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

QS STARS™ RATING SYSTEM

CATEGORY	STAR RATING
Employability	★★★★★
Academic Development	★★★★★
Facilities	★★★★★
Innovation	★★★★★
Arts & Culture	★★★★★
Program Strength: Informatics	★★★★★
Teaching	★★★★★
Overall	★★★★★

80th INTERNATIONAL AWARDS AND MORE THAN 210 NATIONAL AWARDS

a private entrepreneurial model university by UNESCO
*Laporan UNESCO, A New Dynamic: Private Higher Education, World Conference on Higher Education 2009

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
S1 TEKNIK INFORMATIKA/INFORMATIKA (Networking & Software Engineering)
S1 SISTEM INFORMASI (Financial Technology, E-Commerce & Multimedia)
S1 TEKNOLOGI INFORMASI (Animation & Game)

FAKULTAS EKONOMI & SOSIAL
S1 EKONOMI (Digital Economy, Creative Economy & Banking)
S1 KEWIRAUSAHAAN (Digipreneurship & On-line Business)
S1 AKUNTANSI (Business & Taxation)

FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
S1 ARSITEKTUR (Digital Architecture)
S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (Smart City & Creative City)
S1 INFORMATIKA GEOGRAFI/GEOGRAFI (GIS & Documentary Film)

S1 TEKNIK KOMPUTER (Cybersecurity & IoT)
D3 TEKNIK INFORMATIKA (WebDev, Network, 2D Animation)
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA (Mobile Programming, Web Programming and Interactive Multimedia)

S1 ILMU KOMUNIKASI (Visual Design, Marketing, Broadcasting & Cinema)
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL (International Business & Diplomacy)
S1 ILMU PEMERINTAHAN (E-Government & Sociopreneurship)

PASCASARJANA
S2 TEKNIK INFORMATIKA (Informatics Technopreneurship, Business Intelligence & Animation)
PJJ S2 TEKNIK INFORMATIKA

MASTER OF INFORMATICS (Animation)
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (Animation & Game)
BACHELOR OF INFORMATICS (Networking & Software Engineering)
BACHELOR OF INFORMATION SYSTEMS (Financial Technology, E-Commerce & Multimedia)
BACHELOR OF COMMUNICATION SCIENCE (Visual Design, Marketing, Broadcasting & Cinema)

INTERNATIONAL PROGRAM

GELOMBANG III
s.d 21 Agt. 2020

0852-53444-999
0852-9244-4460
0821-3815-7060

pmb@amikom.ac.id
pmb.amikom.ac.id

AMIKOM - Creative Economy Park

AYO DAFTAR AMIKOM

Creative Economy Park
www.amikom.ac.id

KOTA YOGYA RAIH ANUGERAH KPAI 2020

Haryadi: Perlindungan Anak Dibangun dari Keluarga

YOGYA (KR) - Komitmen Pemkot Yogya dalam menyelenggarakan program perlindungan anak mendapat apresiasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Walikota Yogya Haryadi Suyuti pun mengajak para orangtua untuk mampu membangun perlindungan anak sejak dari lingkungan keluarga.

Haryadi menilai, selama masa pandemi virus Korona waktu kebersamaan antara orangtua dengan anaknya justru semakin besar. "Pembentukan karakter anak dalam keluarga itu sangat penting. Orangtua harus mampu memahami dengan baik jika anak merupakan aset bangsa sehingga seluruh haknya harus terlindungi," urainya usai menerima Anugerah KPAI 2020 secara virtual, Rabu (22/7). Anugerah KPAI 2020 diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Kota Yogya menyabet penghargaan tersebut atas komitmennya dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP). Haryadi menambahkan, dirinya sudah meminta KPAI Daerah Kota Yogya untuk membuat pedoman bagi orangtua dalam menjamin hak-hak anak. Berbagai elemen masyarakat seperti PKK di wilayah juga perlu dilibatkan agar tercipta lingkungan yang aman bagi anak. "Kadang orangtua masih ada yang belum memahami perannya, maka pedoman itu juga penting. KPAI Daerah su-

dah saya minta menyentuh aspek pencegahan, sehingga tidak sekadar menindaklanjuti setiap laporan kekerasan anak, bullying dan lainnya," urainya. Terkait anugerah tersebut, menurut Haryadi menunjukkan bahwa Pemkot sudah berada pada jalur yang benar dalam perlindungan anak. Hal itu pun berkat sinergitas unsur pemerintah, masyarakat dan komunitas dalam menjamin hak-hak anak. Akan tetapi dirinya meminta jajarannya agar tidak berpuas diri. Pasalnya tantangan untuk menjamin hak anak juga semakin besar. Terutama hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan rasa aman, hak pendidikan, hak politik dan lainnya. Kota Yogya sejauh ini juga terus berupaya menuju kota layak anak. Di antaranya dengan memperbanyak kampung ramah anak, ruang terbuka hijau publik, hingga melibatkan anak dalam proses musrenbang di wilayah. "Bagi kami, kemajuan kota itu tidak terletak pada kemegahan fisik melainkan bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua warga termasuk anak-anak," urainya. Sementara Ketua KPAI Daerah Kota Yogya Silvi Dewayani, mengaku akan segera menyusun pedoman perlindungan anak bagi keluarga. Apresiasi dari KPAI Pusat itu juga akan ia



KR-Ardhi Wahdan
Haryadi Suyuti bersama jajaran instansi, KPAI Daerah serta Forum Anak Kota Yogya menunjukkan Anugerah KPAI 2020 secara virtual.

tindaklanjuti dengan melakukan evaluasi pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan dan kelurahan. Camat dan lurah yang memiliki dukungan tinggi dalam hal perlindungan anak akan diberikan penghargaan. (Dhi)-f

HARI INI OPERASI PATUH PROGO 2020 Fokus Tiblantas, Tekan Laka Lantas

YOGYA (KR) - Mulai hari ini, Kamis (23/7) hingga 5 Agustus 2020 secara serentak digelar Operasi Patuh di seluruh Indonesia, termasuk di jajaran Polda DIY dengan nama Operasi Patuh Progo 2020. Adapun kekuatan yang diterjunkan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Progo 2020, Polda DIY (210 personel), Polresta Yogya (185 personel), Polres Bantul (173 personel), Polres Sleman (180 personel), Polres Kulonprogo (134 personel), dan Polres Gunungkidul (127 personel). Direktur Lalu Lintas (Dir-lantas) Polda DIY Kombes Pol I Made Agus Prasatya SIK MHum, Rabu (22/7) menyampaikan Operasi



KR-Haryadi
Kombes Pol I Made Agus Prasatya SIK MHum.

Patuh Progo 2020 bertujuan menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalulintas. Dengan terciptanya tertib berlalulintas, diharapkan

bisa mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Digelarnya Operasi Patuh Progo 2020, diharapkan bisa meningkatkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah persebaran Covid-19 pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Made Agus menjelaskan target Operasi Patuh Progo 2020 meliputi orang (pengendara kendaraan bermotor dan sepeda), benda (kendaraan bermotor beserta perlengkapannya), dan lokasi (daerah rawan laka lantas, pelanggaran dan tempat wisata). "Kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya

laka lantas dan penyebaran Covid-19 juga menjadi target pelaksanaan Operasi Patuh Progo 2020," tandas Made Agus. Adapun prioritas penindakan pelanggaran lalu lintas utama di antaranya kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar (potensi fatalitas laka lantas korban meninggal dunia), pengendara sepeda motor yang melawan arus (potensi fatalitas laka lantas korban meninggal dunia), dan penggunaan knalpot blombongan (mengganggu ketertiban umum karena tingkat kebisingan tinggi, sekaligus berpotensi memicu konflik). (Hrd)-f

UPACARA HBA KE-60 SECARA VIRTUAL Kejaksaan Harus Netral dalam Pilkada

YOGYA (KR) - Kajati DIY Sumardi SH MH menegaskan kepada seluruh jajaran kejaksaan harus netral dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Kemudian juga akan membentuk sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Semua pegawai kejaksaan tidak boleh memihak salah satu calon yang maju dalam Pilkada 2020. Tapi harus netral dalam Pilkada," kata Kajati usai upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA), Rabu (22/7). Peringatan HBA ke-60 dilakukan secara virtual dengan inspektur upacara Jaksa Agung. Sedangkan peserta upacara di Kejati hanya diikuti beberapa pejabat dengan menerapkan protokol kesehatan. "Karena pandemi Covid-19, peringatan HBA dilaksanakan secara sederhana dan upacara secara virtual. Dalam pelaksanaan itu juga menerapkan protokol kesehatan," tambah Sumardi. Lebih lanjut dikatakan, untuk menyukseskan Pilkada 2020, pihaknya juga membentuk Gakkumdu. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. "Kami akan membentuk Gakkumdu. Nanti permasalahan yang berkaitan dengan Pilkada, akan dibahas disitu," ujarnya. Mengenai usia ke-60, menurut Kajati, Sesuai amanat dari Jaksa Agung, HBA ini supaya menjadi momentum instan adhyaksa untuk terus melakukan instropeksi diri dan evaluasi terhadap proses penegakan hukum. Selain itu juga untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Sesuai instruksi Jaksa Agung, kita harus terus bergerak dan berkarya untuk bangsa. Kemudian HBA ini momentum meningkatkan kinerja insan adhyaksa," terangnya. (Sni)-f

BERKAITAN KEBIJAKAN ANGGARAN Pemkot Siap Hadapi Perpanjangan Tanggap Darurat

YOGYA (KR) - Wacana perpanjangan tanggap darurat penanganan Covid-19 yang dilontarkan Gubernur DIY, didukung Pemkot Yogya. Bahkan Pemkot siap menghadapinya dengan mengintensifkan koordinasi internal jika status tanggap darurat kembali diperpanjang. Status tanggap darurat penanganan Covid-19 di DIY akan berakhir 31 Juli 2020. Akan tetapi Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada Selasa (21/7) lalu mewacanakan perpanjangan jika kasusnya masih tinggi. "Situasi ini kan belum bisa diprediksi sampai kapan. Kami mendukung sikap Pemda DIY dan siap mengikutinya kaitannya dengan perpanjangan masa tanggap darurat," ujar Walikota Yogya yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Haryadi Suyuti, Rabu (22/7). Haryadi menegaskan, jika kelak tanggap darurat benar-benar diperpanjang bukan berarti memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat. Status tanggap darurat tersebut kaitannya dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Terutama dalam menggunakan pos dana tak terduga dalam rangka penanganan Covid-19. Oleh karena itu, jika ada perpanjangan dirinya berharap

menggunakan siklus bulanan atau hingga akhir Agustus. Hal ini supaya memudahkan proses evaluasi sekaligus administrasi penggunaan anggaran. Sementara dalam hal aktivitas ekonomi masyarakat, Haryadi menegaskan pemerintah tidak pernah melakukan penutupan. Baik aktivitas perhotelan, restoran maupun destinasi wisata. Akan tetapi, setiap usaha yang beroperasi harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. "Kami sudah membentuk satgas pemulihan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah penerapan protokol kesehatannya," tandasnya. Di samping itu, munculnya kebijakan surat keterangan sehat bagi warga dari luar DIY yang hendak masuk wilayah Kota Yogya juga bukan untuk membatasi jumlah kunjungan wisatawan. Akan tetapi hal itu merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warga Kota Yogya maupun DIY. Terutama terhadap potensi penularan virus dari wilayah yang berstatus zona merah atau hitam. "Bahkan bukan hanya surat keterangan, tapi kondisinya harus benar-benar sehat. Itu menjadi jaminan agar jangan sampai kecolongan," katanya. (Dhi)-f

Dewan Minta Masyarakat Disiplin

YOGYA (KR) - DPRD DIY mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyepelekan Covid-19, apalagi penambahan kasus positifnya cukup tinggi. "Sekarang ini kita semua harus waspada, transmisi lokal sudah terjadi," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta, Rabu (22/7). Menurutnnya, Pemda DIY harus bisa menempatkan protokol kesehatan menjadi landasan aktivitas, terutama di sejumlah fasilitas umum dan pelayanan publik. DPRD DIY sendiri saat ini sedang berupaya merevisi Perda tentang ketertiban. Salah satu isi dari Perda akan memasukkan pasal tentang protokol kesehatan dan diharapkan bisa mengikat warga untuk disiplin. Jika melanggar maka bisa langsung dikenai sanksi. Huda mencontohkan, jika masyarakat tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, maka bisa langsung dikenai sanksi. "Jika biasanya dibutuhkan waktu hingga dua tahun dalam penyusunan Perda, ini kita buat percepatan. Diharapkan Agustus atau September ini sudah selesai," ujarnya. Terkait wacana memperpanjang masa tanggap darurat, Huda akan mengusulkan untuk bisa diperpanjang. Karena kasusnya juga belum terkendali. Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanta. Menurutnnya, sosialisasi protokol kesehatan harus terus digencarkan kepada masyarakat. Termasuk menerapkan sanksi-sanksi bagi pelanggar. Melakukan pembatasan kegiatan masyarakat juga bisa menjadi salah satu upaya. "Terutama di wilayah-wilayah yang angka positifnya masih tinggi. Upaya tracking juga bisa dilakukan, baik melalui rapid test atau swab untuk memperkecil tingkat penularannya. Terkait masa tanggap darurat, saya rasa perlu dikaji ulang lebih mendalam dengan melibatkan para ahli kesehatan maupun sosial ekonomi," jelasnya. (Awh/Bro)-f